



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : DEDI ALNANDO
NIK : 1401042709890001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim : 6 Juli 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

☒ Lengkap
☐ Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-11-24 09:49:15



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Juli 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDI ALNANDO
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 766150

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	480.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110000 m2/118 m2 di KAMPAR, WARISAN Rp. 480.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	185.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ RS HONDA JAZZ RS Tahun 2014, HIBAH TANPA AKTA Rp. 185.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	697.000.000
III. HUTANG	Rp.	250.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	447.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **27 November 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.